



Pada tanggal 13 Desember 2021, narasumber menyampaikan tentang Audit dan Optimalisasi Penyusunan Laporan Keuangan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Tengah. Dalam paparannya, narasumber menjelaskan tentang jenis pemeriksaan oleh BPK, Komponen Laporan Keuangan, asumsi dasar, karakteristik dan prinsip laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP Nomor 71 Tahun 2010), serta optimalisasi penyusunan laporan keuangan melalui komunikasi dengan Tim Pemeriksaa pada saat pemeriksaan interim dan contoh-contoh hasil pemeriksaan BPK beserta rekomendasinya. Sedangkan pada tanggal 17 Desember 2021, narasumber menyampaikan materi mengenai Prosedur Analitis Laporan Keuangan. Pada kesempatan ini, narasumber memaparkan tentang pelaksanaan Prosedur Analitis, yaitu tahapan, tujuan dan metode serta implementasinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Paparan diakhiri dengan studi kasus untuk para peserta. Acara juga diisi dengan sesi tanya jawab, pertanyaan dari peserta pelatihan, dan simulasi Penyusunan Laporan Keuangan dan terakhir, penutupan oleh MC.

### PENGAMBILAN SUMPAAH PNS DARI PKN STAN DALAM RANGKA PENGANGKATAN PNS BPK TAHUN 2021

Kamis 23 Desember 2021, Sekretaris Jenderal BPK RI, Bahtiar Arif mengambil sumpah dan melantik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari STAN menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan secara daring melalui zoom, yang dilaksanakan serentak di seluruh perwakilan BPK. Sebanyak 2 pegawai dari STAN penempatan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah juga mengikuti pengambilan sumpah dan pelantikan PNS di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengambilan sumpah dihadiri oleh Sekretaris Jenderal BPK RI, Kepala Biro SDM, Kepala Perwakilan, pejabat lain terkait secara virtual serta para pejabat perwakilan secara offline. Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh PNS yang dilantik dan undangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI pengangkatan PNS, pembacaan sumpah yang diikuti oleh para PNS yang dilantik, pengukuhan sumpah oleh rohaniwan, dan amanat dari Sekretaris Jenderal BPK RI, Bahtiar Arif. Dalam amanatnya, Sekretaris Jenderal BPK RI bahwa pengucapan sumpah atau janji merupakan bentuk ikrar PNS dalam menjalankan tugas dan amanah secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab. Sekretaris Jenderal BPK RI juga berharap PNS yang dilantik untuk terus-menerus memberikan kontribusi kepada BPK RI dan untuk negara tercinta. "Saya berharap Saudara terus mempertahankan semangat dan memberikan kontribusi terbaik kepada BPK RI khususnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bukan hanya dalam masa percobaan tapi juga saat ini dan tahun-tahun yang akan datang." ujar Sekretaris Jenderal BPK RI.



Sekretaris Jenderal BPK RI menyampaikan agar PNS yang dilantik mengamalkan nilai-nilai dasar BPK (Integritas, Independen, Profesional) serta menjaga etika yang sudah diperoleh selama masa pendidikan dan pelatihan. Sebagai bentuk semangat PNS yang dilantik diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang membawa BPK RI ke arah yang lebih baik lagi. "Saudara adalah orang-orang terpilih yang mengabdikan sebagai PNS di lingkungan BPK RI Saudara sekalian diharapkan menjadi agen-agen perubahan yang mampu membawa perubahan di BPK" ujarnya.

Sekretaris Jenderal BPK RI memberikan pengarahannya kepada PNS yang dilantik tentang visi misi BPK serta harapan kepada PNS yang dilantik untuk dapat bekerja dengan maksimal dengan terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri serta bekerja dengan bersungguh-sungguh dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar BPK. Sebelum dilantik, para pegawai sudah melalui beberapa tahapan untuk diangkat menjadi PNS seperti mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) yang dilakukan pada bulan April hingga Juli 2021, melakukan adaptasi di lingkungan kerja atau habituasi, serta aktualisasi yang sesuai dengan jabatan dan lingkungan kerjanya. Acara diakhiri dengan doa, acara berjalan secara tertib dan khidmat serta ditemani senyum bahagia dari pegawai yang telah resmi diangkat menjadi PNS.

### BPK KALTENG MENYERAHKAN SEMBILAN LHP KINERJA DAN PDDT SEMESTER II TAHUN 2021 KEPADA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH



Selasa, 28 Desember 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu (PDDT) Semester II Tahun 2021. Acara yang bertempat di Auditorium dan Ruang VIP Lt.2 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini dihadiri oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah I, Tukino dan Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah II, Mochammad Suharyanto sebagai Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan, para Ketua DPRD atau yang mewakili, para Kepala Daerah atau yang mewakili, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, tim pemeriksa serta para tamu undangan lainnya. Penyerahan LHP dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah I, Tukino dan Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah II, Mochammad Suharyanto sebagai Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan. LHP yang diserahkan terdiri dari:

1. Tiga LHP Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dan Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi Terkait Lainnya;
2. Satu LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Penyediaan Air Minum yang Memenuhi Syarat Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas oleh Pemerintah Kota Palangka Raya serta Instansi Terkait pada TA 2020 s.d Semester I 2021;
3. Satu LHP Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah TA 2019 s.d Semester I TA 2021;
4. Satu LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Perlindungan Sosial Melalui BLT-DD TA 2020 s.d Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
5. Satu LHP Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2021 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau; dan
6. Dua LHP Dengan Tujuan Tertentu atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada KPU dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2020 dan 2021.



Untuk penyerahan LHP Kinerja atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diselenggarakan secara terpisah dengan penyerahan LHP lainnya. Acara dimulai dengan lagu Indonesia Raya dan doa, serta dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan penyerahan LHP kepada masing-masing entitas. LHP diterima oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah I, Tukino. Dalam sambutannya, Tukino menyampaikan simpulan hasil pemeriksaan beserta permasalahan-permasalahan signifikan yang ditemukan dalam pemeriksaan pada masing-masing entitas yang diperiksa. "Perlu kami sampaikan bahwa manfaat dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bukanlah pada hasil pemeriksaan itu sendiri. Namun, terletak pada rekomendasi dan tindak lanjut/perbaikan atas permasalahan-permasalahan yang ditemui. Kami mengharapkan KPU, Bawaslu, dan Pemerintah Daerah dapat segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dalam kurun waktu 60 hari kedepan", ujarnya. Pada akhir sambutannya, Tukino menyampaikan bahwa apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan, maka DPRD dan Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BPK Kalteng. Acara ditutup dengan foto bersama.

**REDAKSI**  
**PENANGGUNG JAWAB :** AGUS PRIYONO  
**REDAKTUR :** DIONISIUS YUDIANTO  
**EDITOR :** URIP AGUNG  
**WEB ADMIN :** DICA SURYA CARDINA  
**WEB DEVELOPER :** KARUNIA WIBISONO  
**PEMBUAT ARTIKEL :** ARTHA MAGDALENA S. NURUL LATIFAH, MUYS, RIZKA BAIHAQI, ANNISA D APRILIA

## Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

# TAHETA Edisi IV/2021

### MEWUJUDKAN HASIL PEMERIKSAAN YANG BERKUALITAS MELALUI FORUM MEDIASI TRIWULANAN PERCEPATAN TLRHP "SIMPATIK" MENUJU WBBM



Palangka Raya – Mewakili Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Subauditorat Kalimantan I Tukino, membuka sambutan kegiatan Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP). Kegiatan yang dilaksanakan pada 30 September s.d 1 Oktober 2021 merupakan lanjutan dari kegiatan percepatan pemantauan TLRHP BPK yang telah dilaksanakan secara online pada tanggal 3 Agustus 2021, dan merupakan pemantauan progress perkembangan percepatan penyelesaian TLRHP sesuai komitmen Kepala Daerah yang telah disampaikan sebelumnya. Kegiatan tersebut diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Kabupaten Seruyan, Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Dalam sambutan, Tukino menyampaikan bahwa untuk mengefektifkan dan memantau pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan, peraturan perundang-undangan memberikan amanat agar BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, untuk selanjutnya diberitahukan kepada lembaga perwakilan melalui hasil pemeriksaan semester. Progres tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK merupakan indikator untuk menilai tentang efektifitas suatu pelaksanaan pemeriksaan. Selain itu Tukino juga memaparkan sosialisasi mengenai Forum Mediasi Simpatik yaitu Forum Mediasi yang bertujuan dalam Percepatan Pemenuhan Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Administratif LHP BPK RI Secara Intensif dan Komprehensif. Dalam Forum Mediasi Simpatik tersebut diharapkan kepada seluruh entitas agar dalam melaksanakan TLRHP dapat memberikan dokumen tindak lanjut dengan sejelas-jelasnya dan mengharapkan kepada seluruh pemegang dosir yaitu para pemeriksa agar memberikan arahan sesuai dengan Rekomendasi yang diberikan kepada entitas terperiksa. Forum Mediasi SIMPATIK tersebut direncanakan dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun. Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan TLRHP dengan masing-masing pemegang dosir selama dua hari. Kegiatan Triwulanan Percepatan TLRHP diakhiri dengan laporan pelaksanaan kegiatan dari Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah I kepada Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas hasil pembahasan dari pemegang dosir masing-masing entitas. Kegiatan ditutup oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Kalimantan Tengah Agus Priyono, dilanjutkan dengan foto bersama antara Kepala Perwakilan dan Kepala Subauditorat Kalteng I beserta Inspektur masing-masing entitas maupun pejabat yang mewakili.



### VISITASI KOMISI INFORMASI KE BPK KALTENG DALAM RANGKA PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2021



Kamis, 7 Oktober 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menerima kunjungan / visitasi dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pemeringkatan keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. Visitasi dilakukan oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah, M. Muklas Roziqin beserta staf dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Priyono didampingi oleh beberapa pejabat struktural. Selama tiga tahun berturut-turut (2019-2021) BPK Kalteng telah mengikuti kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPK Kalteng sebagai badan publik terhadap keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2020, BPK Kalteng telah memperoleh predikat sebagai Badan Publik Peringkat I "Informatif" dalam kategori Badan Publik Vertikal di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan visitasi dimulai dengan pembukaan dari Komisioner Komisi Informasi, M. Muklas Roziqin menyampaikan bahwa visitasi dilakukan sebagai salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemeringkatan keterbukaan informasi publik setelah badan publik menyerahkan SAQ (Self Assessment Questionnaire) dan dilakukan verifikasi oleh Komisi Informasi. Komisi Informasi akan menilai kesesuaian antara SAQ dengan kondisi yang terdapat di BPK Kalteng. Selanjutnya Kepala Perwakilan menyampaikan paparan terkait komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Agus Priyono menjelaskan bahwa terdapat enam hal yang menjadi poin penting dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPK Kalteng yaitu:

1. BPK Kalteng memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki beberapa peraturan yang dipedomani dalam menjalankan tugas dan fungsinya;

Namun tanpa mengurangi upaya dan keberhasilan yang telah dilakukan pemerintah daerah, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan beberapa permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian untuk segera diperbaiki. Pada Pemerintah Kotawaringin Timur diantaranya ditemukan pelayanan perizinan belum mendorong kemudahan berusaha secara memadai, koordinasi pelayanan penanaman modal belum memadai, pengembangan iklim penanaman modal belum mendorong kemudahan berusaha secara memadai dan promosi penanaman modal belum memadai. Sedangkan permasalahan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya adalah Pemprov Kalteng belum memiliki upaya nyata memfasilitasi satuan pendidikan vokasi untuk memperoleh kerja sama industri dan dunia kerja, penjaminan mutu pendidikan vokasi belum selaras dengan industri dan dunia kerja, pengelolaan informasi pasar kerja dan tracer study belum optimal, dan Pemprov Kalteng belum mendorong satuan pendidikan vokasi untuk menerapkan sistem fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit produksi/ teaching factory/ teaching industry. Agus Priyono berharap agar Pemerintah Daerah segera melakukan perbaikan dengan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dalam waktu 60 hari kedepan agar kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal serta penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja berjalan dengan lebih baik lagi dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili berkesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan ucapan terima kasih atas hasil pemeriksaan yang telah diserahkan oleh BPK untuk selanjutnya akan dijadikan masukan dalam melaksanakan perbaikan kedepannya, serta akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam waktu 60 hari kedepan.

### BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENJADI NARASUMBER PELATIHAN PELAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL TAHUN 2021



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Pemeriksa Madya BPK, Sumarsana menjadi Narasumber Pelatihan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua Tahun 2021 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah. Acara yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berlangsung selama 5 (lima) hari, dari tanggal 13 s.d. 17 Desember 2021. Dalam acara ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diberikan 2 (dua) sesi yaitu pada tanggal 13 dan 17 Desember 2021.

- BPK Kalteng memiliki website dan twitter yang selalu update sebagai sarana untuk penyampaian informasi publik kepada masyarakat;
- BPK Kalteng memiliki Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait permintaan informasi dan pengaduan masyarakat baik secara offline maupun online;
- BPK Kalteng memiliki SIKOMPAK (Sistem Komunikasi Pemeriksaan dengan Pemangku Kepentingan) yang merupakan salah satu inovasi yang bertujuan untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas kepada masyarakat. SIKOMPAK diaplikasikan dalam bentuk live chat di website;
- BPK Kalteng memiliki buletin perwakilan dengan nama Buletin TAHETA yang digunakan untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan BPK Kalteng dan diterbitkan setiap triwulan;
- BPK Kalteng melaksanakan media relation untuk membangun komunikasi dan sinergi dengan media. Media relation diantaranya dilakukan dengan kegiatan media workshop, liputan media dan door stop interview, serta media visit.

Setelah pemaparan dari Kepala Perwakilan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan kunjungan ke ruangan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

### BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENJADI NARASUMBER DALAM RAPAT TEKNIS BIDANG KE-PU-AN SE-PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Pada tanggal 18 November 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi narasumber dalam Rapat Teknis Bidang Ke-PU-an Se-Provinsi Kalimantan Tengah, yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bidang Jasa Konstruksi. Acara yang diselenggarakan di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya ini dimulai pada pukul 08.45 WIB, diawali dengan pemaparan dari Pemeriksa Madya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Nurul Huda dan Sumsarna.

Pemapar menyampaikan tema Pemeriksaan Konstruksi, yang terdiri dari: Peraturan terkait Pemeriksaan Konstruksi, jasa konstruksi, pemeriksaan atas kegiatan pemilihan penyedia, pemeriksaan atas pelaksanaan konstruksi yang terdiri dari: lingkup pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi, pemeriksaan konstruksi jalan aspal, bahan jalan aspal, ketentuan sifat-sifat campuran beraspal, penerapan JMF dan toleransi yang diizinkan, ketentuan kepadatan (density), pengendalian mutu, pengukuran dan pembayaran, Pemeriksaan Konstruksi Jalan Beton, Pemeriksaan Lapis Pondasi Agregat (LPA), Pemeriksaan Gedung Bangunan, Pemeriksaan Bangunan Air Saluran Irigasi, dan Pemeriksaan Jembatan.

Kemudian, pada pukul 10.00 WIB Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Priyono melanjutkan materi dari BPK tentang Tugas, Peran dan Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan RI. Dalam pemaparannya, Kepala Perwakilan menyampaikan tentang Kedudukan dan Struktur BPK, Rencana Strategis BPK dan Jenis Pemeriksaan BPK. Acara diakhiri dengan tanya jawab.

### BPK KALTENG PEDULI PEGAWAI KORBAN BENCANA BANJIR PALANGKA RAYA



Kamis, 18 November 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan bantuan kepada pegawai yang terkena bencana banjir di Palangka Raya. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Priyono secara simbolis kepada perwakilan pegawai yang terkena banjir, Sri. Nur Laila, didampingi oleh Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Urip Agung. Banjir terjadi di beberapa daerah di sekitar kota Palangka Raya, diantaranya dikarenakan curah hujan yang tinggi beberapa minggu terakhir. Empat pegawai beserta keluarga terdampak banjir dan harus mengungsi sementara waktu dari tempat tinggal mereka. Dana bantuan dikumpulkan dari sumbangan sukarela seluruh pegawai serta diberikan dalam bentuk uang dan sembako. Pemberian sumbangan tersebut merupakan bentuk empati terhadap korban bencana banjir dan diharapkan dapat membantu meringankan beban mereka.

### BPK KALTENG DAN DINAS PUPR PROVINSI KALTENG TANDA TANGANI MOU PELAKSANAAN PENGIJIAN MUTU KUALITAS BAHAN TERPASANG PEKERJAAN KONSTRUKSI

Kamis, 18 November 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pemeriksaan, Bono Wolson dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah, Elianson Bungas menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pengujian Mutu Kualitas Bahan Terpasang Pekerjaan Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan rapat teknis bidang ke-PU-an se-Kalimantan Tengah, bertempat di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya. Penandatanganan MoU yang dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB ini, turut disaksikan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Priyono, Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Dionisius Yudianto dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah, Shalahuddin. MoU ini dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terutama pemeriksaan atas Belanja Modal Infrastruktur baik jalan, jembatan, gedung dan bangunan. Beberapa hal yang disepakati dalam MoU tersebut diantaranya adalah pengujian material hasil pemeriksaan di lapangan dan penggunaan tenaga teknis dari Dinas PUPR yang bekerja untuk dan atas nama BPK Kalteng dalam rangka kepentingan pelaksanaan pemeriksaan.



Dengan adanya MoU ini diharapkan dapat membantu tim pemeriksa dalam menguji kesesuaian kualitas hasil pekerjaan infrastruktur dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak/perjanjian sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

### BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MENJADI GURU TAMU DI SMK NEGERI 2 PALANGKA RAYA



Pada tanggal 23 November 2021, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah diwakili oleh Pemeriksa BPK, Rohullah Aji Wicaksono dan Selli Cahyani menjadi Guru Tamu pada Kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Guru Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga serta penerapan budaya kerja berbasis budaya kerja dilaksanakan di SMK Negeri 2 Palangka Raya. Acara yang bertujuan untuk menyelenggarakan dengan dunia kerja dan pemenuhan mutu 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan kompetensi guru ini dibuka oleh Ibu Lilik Setyawati, S.Pd. selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Palangka Raya pada pukul 10.00 WIB. Dalam kesempatan ini, Guru tamu menyampaikan tentang Tugas, Peran dan Fungsi BPK RI dan Penerapan Budaya Kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam paparannya, pemapar menyampaikan bahwa terdapat tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK yaitu keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu. Pemeriksaan laporan keuangan sendiri bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah LK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan PABU (Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum) di Indonesia.

Selanjutnya mengenai kebutuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) pemeriksa, BPK melakukan rekrutmen yang saat ini sedang berlangsung dengan sebagian besar kebutuhan SDM yaitu SI Akuntansi. Dengan demikian selain dapat turun langsung di dunia kerja, pemapar berharap bapak ibu guru dapat memberikan dorongan bagi lulusan SMK N 2 Palangkaraya khususnya jurusan akuntansi, tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk menggapai peluang kerja yang semakin baik. Selain itu, Pemapar juga menyampaikan budaya kerja pada BPK, khususnya pada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain menerapkan nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan budaya kerja TANGGUH (Tepercaya, Adaptif, Netral, Gesit, Guyub, Unggul dan Harmonis), dengan motto layanan PRIMA (Profesional, Ramah, Ikhlas, Mudah, dan Andal). Budaya kerja TANGGUH dan layanan PRIMA tersebut diterapkan pada setiap level pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Acara juga diisi dengan sesi tanya jawab, pertanyaan dari pemateri, penyerahan hadiah/souvenir bagi peserta workshop yang dapat menjawab pertanyaan dari pemateri secara cepat dan tepat serta diakhiri dengan penutupan oleh MC.

### PENGAMBILAN SUMPAAH CALON PNS DALAM RANGKA PENGANGKATAN PNS BPK TAHUN 2021



Rabu, 23 November 2021, Sekretaris Jenderal BPK RI secara daring telah melantik dan mengambil sumpah sembilan orang Calon Pegawai Negeri Sipil dari formasi umum menjadi PNS yang ditempatkan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, yang terdiri dari 8 orang lulusan Sarjana Strata 1 dan satu orang Diploma III. Acara pelantikan dimulai pada Pukul 14.00 WIB dan diselenggarakan di Ruang VIP Kalan Lantai 2 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuhan PNS dilaksanakan serentak di 34 kantor perwakilan dengan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal, Kepala Biro SDM secara virtual dan para pejabat perwakilan secara offline. Acara diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal, pembacaan sumpah yang diikuti oleh para Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilantik, pengukuhan sumpah oleh rohaniwan, amanat oleh Sekretaris Jenderal, dan diakhiri dengan doa. Dalam amanatnya, Sekjen BPK menekankan bahwa pengambilan sumpah PNS merupakan bentuk ikrar untuk sanggup mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai PNS, sehingga harus dilakukan dengan niat tulus dan dengan menerapkan nilai-nilai dasar BPK yaitu Integritas, Independensi dan Profesionalisme. Selain itu, Sekjen BPK berpesan agar para PNS yang baru dilantik untuk melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan kreatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi.

### CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BPK MENJALANI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang merupakan kelanjutan dari tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). SKB dimaksudkan untuk menguji kesesuaian kompetensi bidang yang dimiliki dengan formasi yang dipilih. Kegiatan SKB dilaksanakan selama dua hari tanggal 1 - 2 Desember 2021 bertempat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Universitas Palangka Raya. Pelaksanaan SKB ini dihadiri oleh perwakilan Biro SDM BPK Pusat dan Pejabat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Dionisius Yudianto dan Kepala Subbagian SDM, Maulana Ekanri Ulman Yurisman. Peserta SKB diwajibkan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jumlah peserta yang lolos untuk mengikuti SKB sebanyak 22 orang. Pelaksanaan SKB setiap harinya dibagi dalam dua sesi. SKB untuk hari pertama, sesi pertama yaitu psikotes dari Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Universitas Indonesia (UI) dan sesi kedua yaitu psikometri dari RSPAD Gatot Subroto. Sedangkan SKB untuk hari kedua, sesi pertama yaitu Leaderless Group Discussion (LGD) per kelompok dan sesi kedua yaitu wawancara peserta dengan assessor LPT UI. Sebelum pelaksanaan SKB, panitia melakukan pemeriksaan medis kepada setiap peserta berupa pemeriksaan suhu badan dan surat hasil swab antigen serta melakukan registrasi peserta baik secara offline maupun online.



### BPK KALTENG JALIN KEBERSAMAAN DALAM KEGIATAN PORSENI HUT BPK RI KE 75

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun BPK RI ke 75, BPK Kalteng menyelenggarakan rangkaian kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) pada tanggal 3 - 5 Desember 2021. Kegiatan Porseni diawali dengan senam pagi bersama seluruh pegawai dan dilanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Priyono yang didampingi oleh para pejabat struktural. Agus Priyono menyampaikan sambutan pembukaan dan melakukan servis pertama pada permainan bola voli sebagai penanda dimulainya seluruh rangkaian kegiatan Porseni. Tahun ini merupakan kedua kalinya BPK merayakan ulang tahun dalam suasana pandemi Covid-19, sehingga dalam pelaksanaannya tidak lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan.



### BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH GELAR PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2021



Kamis, 9 Desember 2021, Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah secara resmi membuka acara Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Se-Provinsi Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2021. Acara yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 9 Desember hingga 10 Desember 2021 dihadiri oleh 15 Pemerintah daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten

se-Kalimantan Tengah dan diselenggarakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pembahasan selama dua hari ini dilakukan di beberapa ruangan terpisah yang telah disediakan untuk menghindari kerumunan dan penularan virus covid-19. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan yang didampingi oleh Kepala Subauditorat Kalteng menyampaikan bahwa selama bulan Agustus - November 2021, telah dilaksanakan kegiatan percepatan penyelesaian TLRHP melalui Forum Mediasi SIMPATIK bagi entitas dengan tingkat penyelesaian TLRHP di bawah 90%. Forum Mediasi SIMPATIK ini menjadi sebuah media untuk mengefektifkan dan memantau pelaksanaan rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, karena progres tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK adalah merupakan indikator untuk menilai tentang efektifitas suatu pelaksanaan pemeriksaan. BPK mengharapkan hasil pemeriksaan dapat mendorong pemerintah daerah untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel dan efektif.

### BPK KALTENG MENYERAHKAN LHP KINERJA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN PEMERINTAH PROVINSI KALTENG



Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Berdasarkan Pelaksanaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Kalteng telah melakukan pemeriksaan kinerja pada dua Pemerintah Daerah yaitu

- Pemeriksaan Kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 dan 2021 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
  - Pemeriksaan Kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan instansi terkait lainnya untuk Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021
- Pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, bertempat di Ruang VIP Lantai 2 Kantor BPK Kalteng, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Priyono menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja tersebut kepada DPRD dan Pemerintah Daerah. Kegiatan diselenggarakan dalam dua sesi, yaitu sesi pertama dilakukan penyerahan LHP kepada Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Rinie, dan Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor. Sedangkan sesi selanjutnya penyerahan LHP dilakukan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Wakil Ketua Komisi III, Siti Nafsiah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo. Dalam kegiatan tersebut, Agus Priyono didampingi Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemeriksa di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Agus Priyono menyampaikan beberapa upaya dan capaian positif yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan upaya antara lain penyediaan sarana prasarana (sarpras) yang mendukung kegiatan perizinan sesuai dengan yang dipersyaratkan dan menempatkan personel sebagai helpdesk yang membantu menyelesaikan permasalahan aplikasi perizinan yang digunakan. Sedangkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya telah berupaya mengidentifikasi kebutuhan guru Sekolah Menengah Kejuruan dengan membuat peta kebutuhan guru pendidik vokasi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dan sesuai dengan kebutuhan pendidik vokasi per Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.